

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : ASTRIA LESTARI NINGSIH
NIK : 3273264201850005
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA BANDUNG
Jabatan : PANITERA PENGANTI
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 1 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalsas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ASTRIA LESTARI NINGSIH
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 453477

II. DATA HARTA

A.	TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.150.000.000
1.	Tanah dan Bangunan Seluas 82 m ² /46 m ² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000		
2.	Tanah dan Bangunan Seluas 82 m ² /54 m ² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
B.	ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	136.300.000
1.	MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 134.000.000		
2.	MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000		
C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D.	SURAT BERHARGA	Rp.	---
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.050.000
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total		Rp.	1.292.350.000
III.	HUTANG	Rp.	581.947.252
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	710.402.748

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.